

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KEKUATAN BARANG
BUKTI REKAMAN ELEKTRONIK *CLOSED CIRCUIT TELEVISION*
(CCTV) DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Studi Putusan Nomor. 188/Pid.B/2016/PN.Plg)**

SKRIPSI

Oleh:

**Misbahun Nasrullah
NIM. C03214009**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Prodi Hukum Pidana Islam
Surabaya**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Misbahun Nasrullah

Nim : C03214009

Fakultas/Jurusan/Prodi: Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana
Islam (Jinayah)

Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Barang Bukti
Elektronik *Closed Circuit Television* (CCTV) Dalam
Putusan Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor
188/Pid.B/2016/PN.Plg

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adala hasil penelitian dan karya
sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 02 juli 2018
Saya yang menyatakan



Misbahun Nasrullah
C03214009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Misbahun Nasrullah NIM. C03214009 ini telah di
periksa dan disetujui untuk di munaqosahkan

Surabaya, 02 juli 2018
Pembimbing,




Drs. Ahmad Yasin, M. Ag.
NIP.196707271996031002

PENGESAHAN

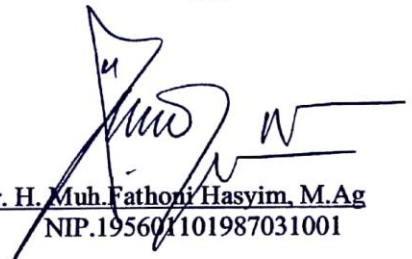
Skripsi yang ditulis oleh Misbahun Nasrullah, NIM. C03214009 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I


Drs. Ahmad Yasin, M.Ag.
NIP. 196707271996031002


Penguji II


Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag.
NIP. 195601101987031001

Penguji III


Syamsuri, MHI.
NIP. 197210292005011004

Penguji IV


Siti Tatmainul Qulub, M.Si.
NIP. 198912292015032007

Surabaya, 8 Agustus 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,


Dr. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MISBAHUN NASRULLAH
NIM : C03214009
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM PIDANA ISLAM
E-mail address : misbahmeone1@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kekuatan Barang Bukti Rekaman Elektronik *Closed*

Circuit Television (CCTV) Dalam Putusan Tindak Pidana Pencurian

(Studi Putusan Nomor 188/Pid.B/2016/PN.Plg)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Agustus 2018

Penulis

(Misbahun Nasrullah)

ABSTRAK

Skripsi ini ditinjau dari penelitian pustaka yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kekuatan Barang Bukti Rekaman Elektronik *Closed Circuit Television* (CCTV) dalam Putusan Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor 188/Pid.B/2016/PN.Plg) Dalam pembahasan tentang rekaman elektronik (CCTV) yang berfungsi sebagai alat pemantau keadaan yang di dalamnya terdapat alat perekam (*Digital Vidio Recorder*) DVR. Kehadiran alat ini sangat bermanfaat sebagai sumber keterangan jika terjadi tindak kejahatan pidana. Namun keberadaan rekaman elektronik CCTV ini tidak termasuk dalam ketentuan alat bukti dalam KUHAP. Keberadaan rekaman elektronik CCTV juga tidak terdapat dalam hukum islam, sehingga muncul pertanyaan bagaimana kedudukan dan kekuatan rekaman elektronik CCTV menurut KUHAP dan hukum islam didalam jalannya persidangan sehingga jadi alat bukti yang sah dan mendukung hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana dengan baik dan benar.

Teknik pengumpulan data dilakukan oleh penulis dengan cara studi kepustakaan dengan pengumpulan dokumen-dokumen terkait permasalahan data putusan selanjutnya data dianalisis dengan cara deskriptif dengan bentuk deduktif yaitu menganalisis dari permasalahan yang umum kemudian ditarik kepada permasalahan yang khusus.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa barang bukti elektronik dalam putusan No 188/Pid.B/2016/PN.Plg. bukan termasuk dalam alat bukti yang sah dalam KUHAP namun barang bukti elektronik dapat menjadi alat bukti tambahan yang sah dengan adanya Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik). Hal ini sebagai petunjuk dan penguat keyakinan hakim dalam syarat harus terlebih dahulu terdapat setidaknya ada dua alat bukti yang sah lainnya. Dalam hukum Islam kekuata barang bukti elektronik bisa sebagai alat bukti *Qarīnah*. *Qarīnah* dalam Islam disebut sebagai petunjuk atau tanda-tanda yang bisa mengarahkan ke jalan kebenaran, *Qāḍī* akan mencermati bukti dan tanda-tanda tesebut untuk memutuskan perkara, sehingga *Qāḍī* dapat menyimpulkannya sesuai dengan keyakinannya.

Sejalan dengan kesimpulan di atas keberadaan rekaman elektronik CCTV bisa menjadi bukti tambahan yang menguatkan hakim dalam proses pembuktian di dalam persidangan. Sehingga rekaman elektronik *Closed Circuit Television* (CCTV) bisa mencegah dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Kepada instansi pendidikan Hukum perlu disadari bahwa keadaan kemajuan zaman dapat mengubah atau menambah suatu aturan yang ada. Dan kepada praktisi dan instansi hukum maupun para legislator untuk merumuskan aturan-aturan yang baru dengan memasukkan rekaman elektronik *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai alat bukti yang sah dan dapat setara dengan alat bukti dalam KUHAP, hal ini berguna untuk menutup celah hukum yang masih kosong demi tegaknya keadilan hukum di Negara Republik Indonesia.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Kajian Pustaka	11
E. Tujuan Penelitian	14
F. Kegunaan Hasil Penelitian	14
G. Definisi Operasional	15
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II PEMBUKTIAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA	22
A. Pembuktian Dalam Hukum Pidana Islam.....	22
1. Pengertian Alat Bukti Dalam Hukum Pidana Islam	22
2. Alat-Alat Bukti Dalam Hukum Pidana Islam	23
B. Pembuktian Menurut Hukum Pidana Di Indonesia ...	31
1. Pengertian pembuktian	31
2. Konsep pembuktian	33

	3. Macam-macam alat bukti	35
	4. Rekaman elektronik <i>Closed Circuit Television</i> (CCTV)	43
BAB III	DESKRIPSI KASUS PIDANA DENGAN ALAT BUKTI REKAMAN ELEKTRONIK <i>Closed Circuit Television</i> (CCTV)	48
	A. para pihak yang bersangkutan dalam kasus pencurian dalam putusan No.188/Pid.B/2016/PN.Plg	48
	1. terdakwa	48
	2. saksi-saksi	48
	B. Kronologi Kasus Pencurian Dalam Putusan Nomor 188/Pid.B/2016/PN.Plg	49
	C. Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Pencurian Dalam Putusan Nomor 188/Pid.B/2016/PN.Plg	53
BAB IV	ANALISIS HUKUM TERHADAP KEABSAHAN BARANG BUKTI REKAMAN ELEKTRONIK <i>CLOSED CIRCUIT TELEVISION</i> (CCTV)	59
	A. Analisis Hukum Terhadap Barang Bukti Rekaman Elektronik <i>Closed Circuit Television</i> (CCTV) Dalam Putusan No.188/Pid.B/2016/PN.Plg	59
	1. Analisis Hukum Pidana di Indonesia	59
	2. Analisis Hukum Pidana Islam	65
BAB V	PENUTUP	72
	A. Kesimpulan	72
	B. Saran	73
	DAFTAR PUSTAKA	74
	LAMPIRAN	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat, kita sebagai makhluk sosial tidak dapat bertindak sesuka hati karena ada norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat. Kepatuhan terhadap norma-norma menciptakan masyarakat yang adil, rukun, dan tentram. Adapun norma-norma yang ada pada masyarakat antara lain norma-norma sosial yang sangat berpengaruh dalam menentukan dan mengatur perilaku anggota masyarakat. Norma-norma yang tumbuh dalam kehidupan bermasyarakat tersebut berfungsi untuk menciptakan ketertiban umum, oleh karena itu sangat diperlukan penerapan dari norma-norma yang ada dalam masyarakat dan penegak hukum secara tegas dan manusiawi berdasarkan rasa kemanusiaan dan keadilan.

Perkembangan zaman yang sangat pesat dan proses globalisasi membawa dampak di seluruh sektor kehidupan masyarakat, sehingga secara tidak langsung mempengaruhi juga pola dan jenis kejahatan yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, aparat dan segenap pihak yang berwenang harus mampu mengungkap dan menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi di masyarakat. Biasanya, suatu tindak Pidana sulit diungkapkan karena pelaku berusaha untuk tidak meninggalkan sidik jari atau tanda bukti lainnya. Hal ini dilakukan untuk lepas dari jeratan hukum dan mengaburkan tanda bukti agar polisi dan penyidik dapat dikelabui.

Tujuan hukum acara Pidana dapat dibaca pada Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang diterbitkan oleh Menteri Kehakiman adalah sebagai berikut:

“Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara Pidana dengan menerapkan hukum Pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak Pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan pada tahap persidangan perkara tersebut.”¹

Berdasarkan kalimat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum acara Pidana bertujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya

[illegible]

Menurut Mr. J. M. Van Bemmelen, menyimpulkan bahwa tiga fungsi pokok acara Pidana adalah²:

- Ketiga fungsi tersebut yang paling penting adalah mencari kebenaran karena merupakan tumpuan dari kedua fungsi berikutnya, setelah menemukan kebenaran yang diperoleh melalui alat bukti dan barang bukti maka, hakim akan sampai kepada putusan yang seharusnya adil dan tepat yang kemudian dilaksanakan oleh jaksa. Dimana tujuan hukum acara Pidana adalah mencapai suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat.

² Ibid, 8-9

Di dalam Q.S. 49 Al-Hujurat:6 telah dijelaskan pentingnya untuk mencari kebenaran atas suatu bukti yang ada.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ
فَتُصِيبُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak

³ Hasbi Ash Shiddieqi, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*(Semarang:PT Pustaka Rizki Putra, cet.I, 1997), 136

Oleh sebab itu, metode pembuktian yang dikembangkan oleh hakim haruslah benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat sungguh-sungguh menghasilkan keadilan. Pembuktian merupakan proses untuk menentukan hakikat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta-fakta masa lalu yang tidak terang menjadi terang yang berhubungan dengan adanya tindak pidana.

Tata cara pembuktian berpedoman pada Pasal 183 KUHAP, dan dalam tahap pembuktian tersebut akan ditentukan terbukti atau tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum. Ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP⁷, dapat dipahami bahwa:

“Pemidanaan baru boleh dijatuhkan oleh Hakim apabila terdapat sedikitnya dua alat bukti yang sah dan menimbulkan keyakinan hakim, bahwa perbuatan Pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa”.

[illegible]

Dalam sub penghukuman hukum acara pidana mengatur cara-cara bagaimana negara menggunakan haknya untuk melakukan hal dalam perkara-perkara yang terjadi. Dalam hukum acara pidana mengatur tentang pembuktian dan perihal alat-alat bukti, aturan-aturan khusus tentang alat bukti hanya diatur di dalam satu pasal saja yaitu Pasal 184 KUHAP yang antara lain menjelaskan tentang pengertian keterangan saksi, kemudian tentang kekuatan pembuktiannya dan lain sebagainya. dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, dinyatakan bahwa alat bukti yang sah terdiri dari:⁹

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli

⁸ <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5073b4c6c99ba/bukti-permulaan-yang-cukup-sebagai-dasar-penangkapan>, diakses pada 29 Maret 2018

⁹ Ibid, 162

- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.

Usaha dalam memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya. Dalam hal demikian maka bantuan seorang ahli sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap lengkapnya bagi para penegak hukum tersebut.

Di dalam alat bukti yang ada di Hukum Islam, tidak ada yang menyatakan barang bukti rekaman elektronik *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai alat bukti. Alat bukti dalam Hukum Islam yang paling sering digunakan yaitu persaksian. Persaksian yang dilakukan oleh seorang maupun beberapa orang dalam kasus tindak Pidana. Sumpah juga merupakan alat bukti dalam Hukum Islam yang sering digunakan dalam masalah tindak pidana kejahatan. Namun kemajuan perkembangan teknologi membawa pengaruh tersendiri terhadap alat-alat bukti dalam Hukum Islam. Perkembangan teknologi tentunya tidak menghalangi *Qadhi* untuk melakukan sebuah ijtihad jika terdapat alat bukti elektronik *Closed Circuit Television* (CCTV) yang merupakan sebuah perkembangan teknologi yang harus dapat dicari ketentuan hukumnya jika digunakan sebagai pembuktian dalam Hukum Islam.

Di dalam UU No.11 Tahun 2008 Jo UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) diterangkan tentang ketentuan dan definisi mengenai alat bukti. Tentunya alat bukti yang terkait dengan permasalahan ITE. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah¹¹.

Maka dari itu keberadaan rekaman elektronik *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai alat bukti dalam kasus Pidana di zaman sekarang ini sangat penting untuk dikaji. Dalam pembuktian tindak Pidana di pengadilan, rekaman elektronik *Closed Circuit Television* (CCTV) selalu menjadi alat untuk memberikan keterangan-keterangan yang berupa peristiwa dari tindak

¹¹ Undang-Undang No 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No 19 Tahun 2016, pasal 5 ayat (1)

Berdasarkan dari latar belakang yang telah penulis jabarkan di atas, dapat diidentifikasi permasalahan, diantaranya:

- Berdasarkan dari identifikasi masalah di atas, penulis memberikan pembatasan masalah dengan menitik beratkan serta memfokuskan pembahasan mengenai keabsahan pembuktian barang bukti rekaman elektronik *Closed Circuit Television* (CCTV) dalam hukum acara Pidana di Indonesia dan hukum Pidana Islam dengan Studi Putusan Nomor 188/Pid.B/2016/PN.Plg tentang pencurian dengan pemberatan yang berkaitan dengan barang bukti rekaman elektronik *Closed Circuit Television* (CCTV) dalam kasus ini.

1. Bagaimana kekuatan barang bukti rekaman elektronik *Closed Circuit Television* (CCTV) dalam persidangan tindak pidana pencurian Putusan Nomor 188/Pid.B/2016/PN.Plg ?
2. Bagaimana analisis Hukum Pidana Islam terhadap kekuatan barang bukti rekaman elektronik *Closed Circuit Television* (CCTV) dalam persidangan tindak pidana pencurian Putusan Nomor 188/Pid.B/2016/PN.Plg ?

Kajian kepustakaan yang membahas mengenai kekuatan barang bukti rekaman elektronik *Closed Circuit Television* (CCTV) dapat dikatakan cukup, untuk memperlancar dan mempermudah penelitian ini penulis akan menggunakan kitab-kitab, beberapa buku referensi penelitian, ataupun karya-karya ilmiah yang ada kaitannya dengan skripsi penulis serta yang membahas mengenai kekuatan barang bukti rekaman elektronik *Closed Circuit Television* (CCTV) dalam hukum acara Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam.

[illegible]

1. Mengenai keakuratan bukti rekaman video CCTV sangat diperlukan oleh pihak kepolisian untuk melakukan proses penyelidikan dan validitas hasil rekaman video CCTV hanya dapat diketahui oleh orang yang ahli IT (*Information Technology*) forensik. Laporan dari ahli ini diperlukan guna menguatkan meyakinkan hakim dalam proses pembuktian di persidangan.
2. Keakuratan alat bukti hasil rekaman video CCTV dalam proses pembuktian menurut KUHAP akan menjadi sebuah alat bukti petunjuk serta kesimpulan dari hakim akan lebih meyakinkan jika dikuatkan dengan keterangan ahli dan menurut Hukum Islam termasuk sebagai alat bukti *Qarīnah*.

[illegible]

Skripsi yang ditulis oleh Khafif Sirojuddin, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2012 dengan judul “ *Problematika Closed Circuit Television (CCTV) sebagai Alat Bukti menurut Pasal 184 KUHAP dan Hukum Islam*”. Skripsi ini menjelaskan tentang problematika kedudukan CCTV sebagai alat bukti di pasal 184 KUHAP serta tinjauan dalam Hukum Islam pembuktian dalam bentuk CCTV dengan rekam kejadian dengan kesimpulan bahwa CCTV merupakan alat bukti yang tidak disebutkan dalam KUHAP namun alat bukti ini dapat digunakan untuk menunjang keyakinan hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Ada juga skripsi yang disusun oleh saudari Fatih Hamama Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “Data komputer sebagai alat bukti dalam perspektif Hukum Acara Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”. Skripsi ini membahas mengenai studi komparatif alat bukti data komputer menurut Hukum Acara Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam

Dengan demikian pembahasan tentang “Kekuatan barang bukti rekaman elektronik *Closed Circuit Television (CCTV)* dalam Putusan Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor 188/Pid.B/2016/PN.Plg) tidak ditemukan atau belum dikaji, baik berupa buku maupun karya-karya ilmiah yang lain. Oleh karena itu penyusun berusaha untuk mengangkat persoalan diatas dengan melakukan telaah literatur yang menunjang penelitian ini.

2. Sumber data

a. Bahan hukum primer

b. Bahan hukum sekunder

c. Bahan hukum tersier

Teknik pengumpulan data ada 2, yaitu:

- a. Dokumentasi, yaitu dengan mempelajari isi dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan Perkara Nomor 188/Pid.B/2016/PN.Plg tentang tindak Pidana pencurian berencana yang berkaitan dengan pembuktian menggunakan barang bukti rekaman elektronik (CCTV).
- b. Pustaka, yaitu dengan cara menggali data untuk menelaah literatur-literatur maupun buku-buku yang berkaitan dengan pembuktian dan alat bukti elektronik *Closed Circuit Television* (CCTV)

Setelah data berhasil dikumpulkan, kemudian dilakukan pengolahan data dengan menggunakan metode sebagai berikut¹⁶:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali data-data secara cermat tentang kelengkapan, relevansi serta hal yang perlu dikoreksi dari data yang telah dihimpun yang berkaitan dengan keabsahan saksi *testimonium*

[illegible]

- ## 5. Teknik Analisis Data

- [illegible]

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika merupakan suatu penjabaran secara deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis, yang secara garis besar terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Dalam penelitian ini, penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang akan memaparkan tentang tinjauan mengenai alat bukti dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam. Dalam bab ini berisi tentang pengertian dan landasan hukum terkait fungsi alat bukti, sistem hukum pembuktian, serta macam alat bukti dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam.

Bab ketiga ini memaparkan tentang temuan data tentang pencurian dengan pemberatan serta pembuktian barang bukti rekaman elektronik *Closed Circuit Television* (CCTV) dengan pokok pembahasan tentang pengertian barang bukti rekaman elektronik *Closed Circuit Television* (CCTV), menguraikan tentang kronologi perkara serta pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pencurian dengan pemberatan yang berkaitan dengan menggunakan barang bukti rekaman elektronik *Closed Circuit*

Television (CCTV), serta kedudukan dan kekuatan barang bukti rekaman elektronik *Closed Circuit Television* (CCTV) dalam pembuktian.

Bab keempat penulis akan menjelaskan mengenai hasil analisis terhadap Putusan Nomor 188/Pid.B/2016/PN.Plg tentang pencurian dengan pemberatan yang berkaitan dengan pembuktian menggunakan barang bukti rekaman elektronik. Hal tersebut akan dijelaskan berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam.

Bab kelima merupakan bab terakhir berupa kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang telah dianalisis pada bab-bab sebelumnya. Dan dalam bab ini juga berisikan saran-saran yang berguna untuk kemajuan ilmu hukum baik hukum positif maupun Hukum Islam.

PEMBUKTIAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

1. Pengertian Alat Bukti Dalam Hukum Pidana Islam

Dalam pembuktiannya seseorang harus mampu untuk menghadirkan ke persidangan bukti-bukti yang otentik. Keharusan pembuktian ini didasarkan antara lain pada firman Allah SWT, dalam QS. Al-Baqarah (2): 282, yang berbunyi:

² Ibid, 136.

Ayat diatas mengandung makna bahwa apabila ada seseorang yang sedang berperkara atau sedang mendapatkan permasalahan, maka para pihak harus mampu membuktikan hak-haknya dengan mengajukan saksi-saksi yang dipandang paling adil.⁴

Adapun alat-alat bukti (*hujjah*), ialah sesuatu yang membenarkan gugatan. Para fuqoha' berpendapat bahwa alat bukti ada 7 (tujuh) macam, yaitu:⁵

- [illegible]

1) *Iqrār* (pengakuan)

Pengakuan dalam peradilan adalah mengakui adanya hak orang lain yang ada pada diri perilaku itu sendiri dengan ucapan atau berstatus sebagai ucapan dan isyarat meskipun untuk masa yang akan datang.⁷

Macam-macam pengakuan sendiri di tinjau dari segi pelaksanaannya dibagi menjadi tiga yaitu⁸:

a.) *Iqrār* dengan kata-kata:

Pengakuan yang diucapkan di muka sidang dapat dijadikan alat bukti dan dijadikan *hujjah* bagi orang yang berikrar dan jika diucapkan di luar sidang maka akan dapat dijadikan alat bukti.

b.) *Iqrār* dengan isyarat:

Apabila seseorang tidak dapat bicara atau (bisu) maka Iqrār baginya dapat dilakukan dengan menggunakan isyarat, dengan ketentuan isyarat tersebut dapat dipahami oleh umum.

⁷ A Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta :Amzah,2012), 40

⁸http://www.academia.edu/pembuktian_dalam_hukum_pidana_islam.com yang diakses pada tanggal 25 juni 2018.

Iqrār dengan tulisan semula tidak dibenarkan dengan alasan dan mungkin dapat dihapus ataupun ditambahi. Akan tetapi, mengingat kemajuan zaman saat ini terdapat cara untuk membedakan antara tulisan asli atau palsu.

Syahadah (kesaksian) adalah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar, dan ia alami sendiri sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tertentu.⁹

Kewajiban untuk menjadi saksi dan memberikan kesaksian didasarkan pada firman Allah SWT QS. Al-Baqarah (2) 282 :

ج ... وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ...

“...janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil...”.¹⁰

Menurut Abdul Karim Zaidan dalam bukunya Anshoruddin yang dapat dikatakan memenuhi syarat sebagai saksi:¹¹

¹⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Surabaya: Mahkota, Cet. V, 2001), 48.

- Dalam hal ini Roihan A. Rasyid memberikan beberapa kriteria *qarinah* yang dapat dijadikan sebuah alat bukti:¹³
- Qarīnah* harus jelas dan meyakinkan sehingga tidak bisa dibantah oleh manusia yang berakal.
 - Qarīnah* menurut Undang-undang dilingkungan peradilan sepanjang tidak jelas-jelas bertentangan dengan hukum islam.

Sumpah menurut ahli fiqih adalah pernyataan yang khidmat yang diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat sifat Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan diberikan hukuman oleh-Nya. Menurut hukum Islam istilah sumpah lebih dikenal dengan *Al-Yamin*, namun dalam konteks hukum pidana biasa lebih dengan istilah *Qasamah*.¹⁴ Nabi Muhammad mengakui dan menetapkan sumpah bisa digunakan

¹⁴ Sulaikhan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia.....*135.

b) Sumpah yang dilakukan oleh tergugat dengan tujuan untuk menolak gugatan dari penggugat karena penggugat tidak memiliki alat bukti. Sumpah seperti ini disebut dengan sumpah pemutus.

Penolakan sumpah atau *nukūl* berarti pengakuan. Ini merupakan alat bukti dan penggugat memperkuat gugatannya dengan bukti lain agar gugatannya dapat mengena kepada pihak yang lain.¹⁷

Dalam mazhab Al Syafi'i dan Imam Malik, penolakan sumpah tidak dapat dipakai sebagai alat bukti tetapi jika penggugat menolak bersumpah maka sumpah dikembalikan

¹⁸ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut....*, 102.

Disisi lain Mazhab zhahiri dan Ibnu Hazem, menetapkan hukum berdasar penolakan sumpah dan pengembalian sumpah, yakni tidak memiliki dasar hukum yang kuat.¹⁹

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dari kata “bukti” – terjemahan dari Bahasa Belanda, *bewijs* – diartikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam kamus hukum, *bewijs* diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidak benaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada hakim bagi penilaiannya.²⁰

J.C.T. Simorangkir berpendapat bahwa pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat

²⁰ Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1986), 83.

dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut.²¹

Yahya Harahap memberikan pendapat definisi pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.²²

Pembuktian juga mencakup ketentuan-ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa yang didakwakan. Pembuktian juga memiliki arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwalah yang melakukannya, sehingga harus bertanggungjawab terhadap perbuatannya.²³

Penjelasan Pedoman Pelaksanaan KUHAP dikatakan, tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil. Mencari kebenaran materiil itu tidaklah mudah, hakim yang memeriksa suatu perkara yang menuju ke arah ditemukannya kebenaran materiil, akan tetapi usaha hakim menemukan kebenaran materiil itu dibatasi oleh surat dakwaan jaksa. Hakim tidak dapat menuntut supaya jaksa mendakwa dengan dakwaan lain atau menambah perbuatan yang didakwakan. Dalam batas surat dakwaan itu, hakim harus

²¹ J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983),135.

²² Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 273.

²³ Darwin Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, (Jakarta: Djambatan, 1998), 133.

Sebelum masuk dalam persidangan, sebenarnya dalam hal pembuktian pengumpulan bukti tindak pidana sudah dilakukan dalam proses penyidikan tersebut dilakukan pengumpulan bukti untuk meyakinkan bahwa tindakan tersebut tindak pidana atau bukan.

Pembuktian merupakan hal yang terpenting dalam acara pidana. Pembuktian perlu dilakukan untuk membuktikan bersalah atau tidaknya seseorang terdakwa melewati pemeriksaan yang dilakukan di depan sidang pengadilan. Untuk melaksanakan suatu pembuktian, haruslah terdapat alat-alat bukti yang sah. Alat-alat bukti pada akhirnya akan meyakinkan hakim dalam menemukan kebenaran materiil.

- a. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*)

[illegible]

dengan sistem formal. Teori ini sudah tidak mendapat penganut lagi, dikarenakan terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut dengan undang -undang.²⁴

Macam-macam alat bukti KUHAP untuk menentukan suatu kebenaran yang obyektif, harus menggunakan alat bukti. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat - alat bukti tersebut, dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.²⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka dinilai sebagai alat bukti dan yang dibenarkan mempunyai “kekuatan hukum”, hanya terbatas pada alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dengan kata lain, sifat dari alat bukti menurut KUHAP adalah limitatif atau terbatas pada yang ditentukan saja.

Kekuatan pembuktian diatur dalam Pasal 183 KUHAP dengan asas unus testis nullus testis. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana dengan sekurang-

²⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara.....*,254.

²⁸ Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*. (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011), 23.

Keluarga sedarah atau smenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama - sama sebagai terdakwa;

- “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya.”

³⁰ Ibid, 260.

Pasal 161 ayat (1) KUHAP merumuskan bahwa:

Pasal 161 ayat (2) KUHAP merumuskan bahwa:

Penjelasan Pasal 161 ayat (2) KUHAP tersebut menunjukkan bahwa pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak.

“Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji , tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim”.

Ini berarti tidak merupakan kesaksian menurut undang - undang,bahkan juga tidak merupakan petunjuk, karena hanya dapat memperkuat keyakinan hakim. Sedangkan kesaksian atau alat bukti yang lain merupakan dasar atau keyakinan hakim. Pasal 184 ayat (4) KUHAP mengatakan bahwa

[illegible]

2) Keterangan Ahli

“Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.”

- a) Pasal 120 KUHAP, adalah ahli yang mempunyai keahlian khusus;
- b) Pasal 132 KUHAP, adalah ahli yang mempunyai keahlian tentang surat dan tulisan palsu;
- c) Pasal 133 KUHAP menunjuk Pasal 176 KUHAP, untuk menentukan korban luka keracunan atau mati adalah ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya.

[illegible]

Keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi, tetapi sulit dibedakan dengan tegas. Kadang-kadang seorang ahli merangkap pula sebagai saksi. Isi keterangan seorang saksi dan ahli berbeda. Keterangan seorang saksi mengenai apa yang dialami saksi itu sendiri sedangkan keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal tersebut.³³

pengertian surat terdapat dalam Pasal 187 KUHAP yang terdiri dari empat ayat. Yang mana setiap ayat mengandung isi, ayat pertama berisi surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, memuat tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan tersebut. Ayat kedua berisi surat yang dibuat

³³ Siswanti Deta P, *Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Cctv Dalam Tindak Pidana Kekerasan Yang Menyebabkan Luka* (skripsi--Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2014)

Sesuai dengan jiwa KUHAP, kepada hakimlah diserahkan pertimbangan tersebut. Dalam hal ini hanya akta otentik yang dapat dipertimbangkan, sedangkan surat dibawah tangan tidak dipakai lagi dalam hukum acara pidana. Tetapi selaras dengan Pasal 187 butir d KUHAP, menurut Andi Hamzah surat dibawah tangan masih memiliki nilai jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.³⁴

Pengertian petunjuk terdapat dalam Pasal 188 KUHAP yang merumuskan bahwa:

³⁴ Ibid, 276.

5) Keterangan Terdakwa

4. Rekaman Elektronik *Closed Circuit Television* (CCTV)

a. Pengertian rekaman *Closed Circuit Television*

Closed Circuit Television (CCTV) adalah alat perekaman yang menggunakan satu atau lebih kamera video dan menghasilkan data video atau audio. *Closed Circuit Television* (CCTV) memiliki manfaat sebagai alat untuk dapat merekam segala aktifitas dari jarak jauh tanpa batasan jarak, serta dapat memantau dan merekam segala bentuk aktifitas yang terjadi dilokasi pengamatan dengan menggunakan laptop secara *real time* dari mana saja, disamping itu

[illegible]

CCTV dalam kasus tertentu memiliki peranan yang sangat penting untuk mengungkap kasus atau menunjukkan keterlibatan seseorang dengan kasus yang diinvestigasi. Dari CCTV, perilaku orang dapat terlihat melalui kamera CCTV selama 24 jam. Dengan prosedur penanganan barang bukti CCTV yang benar kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dan analisis forensik, istilah ini digunakan untuk merujuk penggunaan istilah dalam dunia olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) yang sebenarnya. Selanjutnya menggunakan analisis metadata, didefinisikan sebagai “data mengenai data”, artinya data-data kecil yang di-encoded sedemikian rupa yang berisikan data besar yang lengkap tentang sesuatu.

www.ras-eko.com/2013/04/pengertian-closed-circuit-television.html diakses 25 mei

b. Kedudukan CCTV

Kecenderungan terus berkembangnya teknologi membawa berbagai implikasi yang harus diantisipasi dan diwaspadai, maka terdapat upaya yang telah melahirkan suatu produk hukum dalam bentuk UU No.11 Tahun 2008 Jo UU No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun dengan lahirnya Undang - Undang tersebut belum semua permasalahan menyangkut masalah Informasi dan Transaksi Elektronik dapat ditangani.

[illegible]

Barang bukti Elektronik barang bukti ini bersifat fisik dapat dikenal secara visual, oleh karena itu digital *forensic analyst* harus sudah memahami untuk kemudian dapat mengenali masing-masing barang bukti elektronik ini ketika sedang melakukan proses *searching* (pencarian) barang bukti di TKP jenis-jenis barang bukti elektronik meliputi:³⁸

- 1) Computer PC, laptop/notebook, netbok, tablet;
- 2) Handphone, Smartphone;
- 3) Flashdisk/thumbdrive;
- 4) Floppydisk;
- 5) Harddisk;
- 6) CD/DVD;
- 7) Router,Switch; hub;
- 8) Kamera Video, CCTV;
- 9) Kamera Digital;
- 10) Music/Video Player, dan lain-lain.

[illegible]

diatur dalam Undang- Undang ini, baik berada diwilayah Indonesia maupun luar wilayah hukum Indonesia yang m akibat hukum diwilayah hukum Indonesia atau diluar wilayah Indonesia.

DESKRIPSI KASUS PIDANA DENGAN ALAT BUKTI REKAMAN ELEKTRONIK CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV)

1. Terdakwa

Terdakwa adalah seorang laki-laki kelahiran 1 Juni 1994 yang bernama Fahrul Rozi Bin Syarifuddin, yang beralamatkan di jl. Merante sei buayo RT.34 RW.08 Kel.Kemas Rindo Kec.Kertapati Palembang, beragama islam dan bekerja sebagai security. Terdakwa Fahrul Rozi bersama dengan temannya yang bernama Abdul Wahab yang pada perkara ini masih dijadikan saksi (berkas terpisah) oleh Pengadilan Negeri Palembang.¹

- a. Saksi 1 : Hendra (saksi mengetahuinya dari rekaman CCTV)
- b. Saksi 2 : Ferru Setiady Mungana (saksi mengetahuinya dari rekaman CCTV)

¹ Direktori Putusan Pengadilan Negeri Palembang (No.188/Pid.B/2016/PN.Plg), 1

Berawal pada waktu dan tempat diatas terdakwa bersama-sama saksi Abdul Wahab berencana melakukan pencurian di karaoke Inul Vista, kemudian terdakwa melakukan pencurian di karaoke inul Vista, kemudian terdakwa menemui saksi Abdul Wahab di tempat saksi Abdul Wahab bekerja di toko roti Brasserie lalu keluar lewat melalui atap gedung Inul Vista. Kemudian saksi abdul wahab memutar CCTV dan mencoba membuka trakli yang berada diatap gedung karaoke inul Vista tetapi tidak berhasil kemudian oleh terdakwa trail tersebut dibuka secara paksa dengan menggunakan linggis, setelah berhasil membuka trail tersebut terdakwa dan saksi abdul wahab langsung masuk dan menuju brankas

Kemudian uang hasil pencurian tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) sebagian saksi Abdul Wahab mendapatkan bagian sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) berikut peralatan berupa 1 (satu) buah modem/USB, 1 (satu) perangkat HUB dan Volt dan 1 (satu) unit kamera CCTV infrared (lima belas juta rupiah).³

² Direktori Putusan Pengadilan Negeri Palembang (No.188/Pid.B/2016/PN.Plg), 3

[illegible]

Selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, jaksa penuntut umum telah mengajukan 2 saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum yang di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- [illegible]

Dari pengakuan terdakwa ia terdakwa bersama sdr Abdul Wahab sebelumnya juga melakukan pencurian brankas di karaoke Inul Vista.

e. Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mebenarkannya.

a. Terdakwa Fahrul Rozi Bin Syarifudin bersama-sama dengan saksi Abdul Wahab (berkas terpisah) pada hari jum'at tanggal 9 Oktober 2015 pukul 03.00 Wib bertempat di karaoke Inul Vista Komplek Pertokoan Palembang Square no.99-100 Kec.IB melakukan pencurian dengan pemberatan.

[illegible]

- c. Dari pengakuan terdakwa ia bersama sdr Abdul Wahab sebelumnya juga melakukan pencurian di karaoke Inul Vista.
- d. Akibat perbuatan terdakwa Fahrul Rozi tersebut karaoke Inul Vista kehilangan uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- e. Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mebenarkannya.

Sebelum hakim menjatuhkan putusannya maka yang perlu diketahui dahulu adalah Jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan melalui surat tuntutan pidana. Menimbang bahwa persidangan terdakwa oleh jaksa penuntut umum didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif;

[illegible]

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud memiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dnegan bersekutu;
5. Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara memanjat;

Yang dimaksud “Barang Siapa” adalah subjek hukum, pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dengan tanpa membedakan warga Negara Indonesia maupun orang Asing, jenis kelamin, agama, pekerjaan atau jabatan seseorang untuk diminta pertanggung jawaban secara melawan hukum, dalam arti tidak ada alasan pembenar dan atau pemaaf bagi pelaku subjek yang bersangkutan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

- c. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa fakta yang diperoleh didepan persidangan telah nyata barang berupa 1 (satu) brankas warna hitam merk sentry safe beserta uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ada didalam brankas, 1 (satu) perangkat HUB & Volt dan 1 (satu) unit kamera CCTV milik karoke inul vista yang diambil terdakwa bersama dengan sdr Abdul Wahab terdakwa tidak memiliki izin

Berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa fakta yang diperoleh di depan persidangan telah nyata barang berupa 1 (satu) brankas warna hitam merk sentry safe beserta uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ada didalam brankas, 1 (satu) perangkat HUB & Volt dan 1 (satu) unit kamera CCTV milik karaoke inul Vista, terdakwa bertugas sebagai petunjuk jalan serta bersama sdr Abdul Wahab masuk kedalam karaoke inul Vista untuk mengambil barang.

- e. Unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara memanjat ;

[illegible]

Berdasarkan pertimbangan diatas maka majelis hakim menganggap unsur perkara ini telah secara sah dan meyakinkan. Hakim sebelum Menimbang dan menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan, dalam kasus perkara ini hal yang memberatkan adalah Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, dan hal yang meringankan adalah terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui perbuatannya:

perbuatan terdakwa yang meresahkan masyarakat dan merugikan tempat karaoke Inul Vista maka di jatuhkan pasal 363 ayat (1) ke 4,5 KUHP dengan keputusan hakim dibawah ini sebagai berikut :⁴

- a. Menyatakan terdakwa Fahrul Rozi bin Syarifudin secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pencurian dengan keadaan memberatkan.

[illegible]

- b. Menjatuhkan pidana oleh karena itu oleh terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
- c. Menyatakan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
- d. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- e. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit kamera CCTV, 1 (satu) unit HUB 8 Volt, 1 bush topi warna hijau tulisan elemen, 1 (satu) unit brankas warna hitam merk centry safe, 1 (satu) unit flasdisk yang berisi rekaman CCTV tanggal 19 oktober 2015, 1 (satu) unit flasdisk yang berisi rekaman CCTV tanggal 12 agustus 2015, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) unit brankas warna cream, satu pasang sarung tangan kain warna putih, satu helai kaos lengan panjang warna biru, satu helai celana pendek warna abu-abu bertuliskan piko, dipergunakan dalam perkara abd wahab bin ali aman.
- f. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,-

ANALISIS HUKUM TERHADAP KEABSAHAN BARANG BUKTI REKAMAN ELEKTRONIK *CLOSED CIRCUIT TELEVISION* (CCTV)

1. Analisis Hukum Pidana di Indonesia

Pembuktian memegang peranan yang penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal hal tersebut tidak benar. Oleh karena itu hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai dan memepertimbangkan nilai pembuktian. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan

59

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan sebuah ketentuan-ketentuan yang digunakan dalam proses peradilan di Indonesia. Mulai dari proses pendahukuan dampai denga putusan hukum, sehingga para penegak hukum mempunyai acuan dasar jika melakuka proses persidangan dalam hal mengenai perkara kasus tindak pidana . khusus mengenai ketentuan-ketentuan alat bukti, di dalam KUHP pasal 184 dijelaskan bahwa alat bukti yang sah bisa dipergunakan di dalam persidangan yaitu:

- Keterangan saksi
- Keterangan ahli
- Surat
- petunjuk

² Yahya Harahap, *Penerapan KUHAP, Pemeriksaan dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika 2012,) 273

Berdasarkan dari manfaat kegunaan kamera CCTV tersebut dalam aplikasi kehidupan sehari-hari tentunya sudah menjadi suatu kebutuhan saat ini dan tentunya kecanggihan dari alat elektronik tersebut sudah menjadi suatu kebutuhan pelengkap atau pendukung dalam sidang pengadilan dalam membuktikan suatu kejadian-kejadian yang terekam dalam kamera CCTV tersebut yang kemudian tersimpan dalam data DVR untuk dapat diperlihatkan, ditonton/disaksikan.

Oleh karena itu, semakin lama semakin kuat desakan terhadap hukum, termasuk hukum pembuktian, untuk menghadapi kenyataan perkembangan masyarakat seperti itu. Sebagai contoh, untuk mengatur sejauh mana kekuatan pembuktian dari suatu dokumen elektronik, file atau video elektronik yang dapat dikatakan kamera CCTV dalam bentuk fisiknya tersebut, yang dewasa ini sudah sangat banyak dipergunakan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, posisi hukum pembuktian seperti biasanya akan berada dalam posisi dilematis sehingga dibutuhkan cara kompromitis. Disatu pihak, agar hukum selalu dapat mengakui perkembangan zaman dan teknologi, perlu pengakuan hukum terhadap

³ Resa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 98

berbagai jenis perkembangan teknologi digital untuk berfungsi sebagai alat bukti di dalam pengadilan.

Terkait kasus pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang No.188/Pid.B/2016/PN.Plg tentang tindak pidana pencurian dalam pemberatan, berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan dari salah satu pembuktian dengan menggunakan barang bukti elektronik *Closed Circuit Television* (CCTV) yang diberikan kepada kejaksaan untuk mengungkap tindak pidana pencuriannya dengan menggunakan kamera CCTV. dalam perkara tersebut untuk mengungkap tindak pidana pencuriannya dan untuk memperkuat keterangan saksi dan alat bukti yang lain berupa benda yang telah diambilnya, rekaman elektronik *Closed Circuit Television* (CCTV) memberikan sebuah gambaran yang jelas dan terperinci atas terjadinya tindak pidana di lokasi yang dimana keterangan saksi melihat dari CCTV begitu jelas terdakwa mencuri dengan temannya.

Bahwasannya rekaman barang bukti rekaman elektronik *Closed Circuit Television* (CCTV) ini bisa dijadikan alat bukti di persidangan atas dasar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) pasal 5 ayat (1).⁴

“informasi/elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”

⁴ Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang No.19 Tahun 2016, pasal 5 ayat (1) tentang ITE

Maka dari itu keberadaan rekaman elektronik CCTV sebagai alat bukti dalam kasus pidana pidana di zaman sekarang ini sangat penting dalam perubahan zaman yang semakin modern.

Selanjutnya di dalam pasal 5 ayat(2) UU ITE ditentukan bahwa:⁵

“informasi elektronik atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.”

Dengan demikian bahwa UU ITE telah menentukan bahwa dokumen elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan merupakan perluasan yang sah sesuai dengan hukum acara yang telah berlaku di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di muka persidangan.

Selanjutnya terdapat penjelasan dalam pasal 5 ayat (3) UU ITE ditentukan bahwa :

“informasi elektronik dan/ dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Yang pada ayat (3) tersebut dijelaskan dalam pasal 6 UU ITE yang menentukan bahwa:⁶

“Suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat

⁵ Ibid ,5

⁶ Ibid,7

2. Analisis hukum pidana Islam

Pembuktian menurut istilah bahasa Arab berasal dari kata “*al-bayyinah*” yang artinya suatu yang menjelaskan.⁷ Secara etimologis berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat menjelaskan hak (benar). Dalam istilah teknis, berarti alat-alat bukti dalam sidang pengadilan. Secara terminologis, pembuktian berarti memberikan keterangan dengan dalil hingga meyakinkan. Dalam arti luas, pembuktian berarti memperkuat kesimpulan dengan syarat-syarat bukti yang sah, sedang dalam arti terbatas pembuktian itu hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat.⁸

⁸ Ibid., 136.

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ^ط فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ
مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا ^ج الْأُخْرَى
وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ^ج ...

“... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil...”⁹

Jika dikatakan, bahwa lahiriyah ayat tersebut menyebutkan bahwa pembuktian dengan saksi satu orang laki-laki serta dua orang perempuan itu pengganti dari pembuktian dengan saksi dua orang laki-laki, maka pembuktian dengan saksi satu orang laki-laki dan satu orang perempuan hanya bisa diterapkan ketika tidak ada saksi dua orang laki-laki¹⁰.

¹⁰ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 260

فَهَذَا مِنْ نُقْصَانِ الْعَقْلِ

"Adapun akal nya kurang disebabkan karena kesaksian dua orang wanita sama dengan kesaksian seorang laki-laki, ini termasuk dari kekurangan akal." (H.R.Ibnu Majah Dan Bukhori)

¹¹ Ibid, 263

Jika masalah persaksian orang-orang perempuan itu diakui, maka kesaksian saksi satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, dapat diterima pula dalam semua perkara yang pembuktiannya dengan mendengar keterangan saksi satu orang laki-laki dan sumpah penggugat.

Dalam runtutnya susunan peradilan dalam hukum Islam tidaklah cukup dengan lingku kesaksian namun juga ada bukti-bukti otentik yang diatur dalam Hukum Acara, yang berguna untuk lebih meyakinkan hakim dalam memutuskan suatu perkara dalam Hukum Pidana Islam mengenal alat bukti yang berkaitan dengan sitem Peradilan Islam adalah sebagai berikut¹³ :

- a. *Iqrār* (Pengakuan)
- b. *Syahādah* (Kesaksian)
- c. *Qarīnah* (Petunjuk-Petunjuk/keyakinan hakim)

¹³ H.A Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta :AMZAH,2012), 40

Dari penjelasan di atas sama halnya jika rekaman video cctv menjadi sebuah bukti dalam kasus pidana. Maka hakim terlebih dahulu akan memeriksa dan mencermati, meneliti dan menganalisa isi yang ada dalam rekaman elektronik (CCTV). kemudian hasil dari pemeriksaan dari hakim tersebut akan disimpulkan dan akan menjadi dalil untuk menguatkan keyakinan hakim atas benar atau tidaknya pelaku tindak kejahatan tersebut.

[illegible]

Hakim di dalam persidangan tentunya secara cermat akan memeriksa alat bukti *Qarīnah* yang ada sebelum keputusan hukum. Alat bukti *Qarīnah* ini bisa disebut *Qarīnah Qadāīyyah*, karena hasil kesimpulan hakim setelah memeriksa perkara. Dalam upaya pembuktian suatu perkara tindak pidana, hakim dengan teliti melihat dan mempertimbangkan bukti-bukti yang tampak secara lahir. Rekaman elektronik (CCTV) memang merupakan salah satu bukti yang secara lahiriyah dapat dipakai sebagai alat pembuktian, bila hal itu di pandang bagus untuk mempertimbangkan hakim dalam memutuskan perkara pidana tersebut. Sehingga mampu untuk mendorong terwujudnya suatu keadilan serta untuk kemaslahatan umat manusia. Sedangkan rekaman elektronik (CCTV) dalam hukum pidana Islam kekuatan pembuktiannya tergantung dari penilaiannya hakim yang memeriksa perkara.

[illegible]

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Faruq, Asadulloh, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Yustika, 2009.
- Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011.
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Ash Shiddieqi, Hasbi, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki, Putra, cet.I, 1997.
- Ash Shiddieqy Tengku, Muhammad Hasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mahkota, Cet.V, 2001.
- Deta P Siswanti, *Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Cctv Dalam Tindak Pidana Kekerasan Yang Menyebabkan Luka*. skripsi--Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2014.
- Djalil, A Basiq, *peradilan islam*, Jakarta :AMZAH, 2012
- G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, cet.1, 2005.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet.7, 2013.
- Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, Jakarta: Aksara Baru, 1983
- Lexy, J.Meleong, *Metodoloogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.

- Lubis, Sulaikan, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005.
- Madkur, Muhammad Salam, *Peradilan Dalam Islam*,alih bahasa: Imron AM Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993.
- Nuh Al-Azhar, Muhammad, *Panduadn Praktis Invetigasi Komputer*, Jakarta: Salemba Infotek,2012.
- Prakoso, Djoko, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta: Liberty Offset, 1988.
- Prinst, Darwin, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: Djambatan,1998.
- Raditio, Resa,*Aspek Hukum Transaksi Elektronik*, Yogyakarta:Graha Ilmu, 2014
- Sasangka, Hari dan Rosita, Lily, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, Cet. 1, 2003.
- Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bogor:POLITEIA,1997
- Sutrisno, Hadi, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Anai Offset,cet II,1985.
- Undang No 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No 19 Tahun 2016, Pasal 5 ayat(1)
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 6 ayat(2)
- <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5073b4c6c99ba/bukti-permulaan-yang-cukup-sebagai-dasar-penangkapan>, diakses pada 29 Maret 2018
- <http://www.ras-eko.com/2013/04/pengertian-closed-circuit-television.html>, diakses 25 mei 2018